MANFAAT MEMPELAJARI ALIRAN ANTROPOLOGI HUKUM

Taufiq

Email : taufiqsaja56@gmail.com

No Bp: 2110003600219

Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Antropologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Kata *Anthropos* berarti manusia dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari mengenai peran, status, atau kedudukan, nilai, norma, juga kebudayaan. Semua ini sangatlah erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum. Sebelum berdirinya komunisme, magistrat-magistrat Tiongkok, misalnya, tidak berurusan dengan mengintrepresentasikan dan menerapkan aturan hukum untuk kasus-kasus konflik yang terjadi, namun menggunakan aturan hukum hanya sebagai pedoman-pedoman dari teladan yang sangat berguna, tetapi tidak harus diteladani dalam kasus konkret. Dalam antropologi hukum tidak dapat membatasi diri pada isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk bentuk sanksinya, tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya.

Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budaya khusus di bidang hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Hukum dipahami sebagai milik sebuah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Konsekuensi logisnya, suatu masyarakat dianggap hanya memiliki satu sistem hukum saja yang mengendalikan perilaku semua anggotanya. Tanpa sedikitpun menyelidiki

konrol-kontrol sosial yang bekerja pada tingkat submasyarakat, subkelompok (misalnya, perkumpulan, kelompok orang yang hidup serumah dan kelompok kerabat) telah secara apriori dikecualikan kemudian mengatur perilaku anggotanya dengan sistem yang telah diterapkan oleh pemimpin kelompok dalam keputusan khusus sistem yang berdasarkan ciri-ciri khas esensinya amat sangat menyerupai hukum pada masyarakat yang meliputi semua kalangan.

Hukum juga diartikan sebagai disiplin (sistem ajaran tentang kenyataan) daln ilmu pengetahuan (yakni ilmu hukum). Sebagai ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dasar sistem hukum dan ilmu kenyataan , maka hukum dikatakan mencakup ilmu tentang kaidah, ilmu pengetahuan dasar sistem hukum seperti misalnya (Sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum). Pengertian lain tentang hukum yaitu bahwa hukum diartikan sebagai proses pemerintah. Maka proses pemerintah itu mencakup beberapa hal seperti peraturan pemerintahan dalam arti sempit, penanggulangan serta peradilan. Hukum diartikan pula sebagai jalinan nilai. Nilai tersebut merupakan suatu konsepsi abstrak didalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik serta apa juga yang dianggap tidak baik (buruk). Hukum diartikan sebagai nilai yang merupakan salah satu unsur dari pandangan manusia mengenai hal-hal yang seharusnya dianuti karena dianggap baik dan hal-hal yang seharusnya dihindari karena hal tersebut dianggap tidak baik ataupun dianggap buruk bagi segolongan yang tidak mengetahui bagaimana unsur yang terkandung sebenarnya.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Antropologi Hukum dapat dilihat dari 2 sisi yaitu antropologi sebagai ilmu pengetahuan artinya bahwa antropologi hukum merupakan kumpulan pengetahuan-pengetahuan tentang kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis atas dasar pemikiran yang logis. Dan pengertian antropologi yang kedua adalah cara-cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada didalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Metode penelitian antropologi hukum adalah :

1. Metode Ideologis, metode ini dilakukan untuk penelitian penjajahan dengan mempelajari laidah-kaidah hukum ideal (norma ideal) yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini memperoleh prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat.
2. Metode Deskriptif, penelitian ini bersifat penjajahan yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum dan kenyataannya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.
3. Study Kasus, biasanya mempelajari kasus-kasus perselisihan kelompok masyarakat, latar belakang kultur yang menyebabkan dan rencana solusi penyelesaiannya.

Selain dari metode penelitian diatas, masih ada metode pendekatan dalam antropologi hukum. Metode pendekatan dalam antropologi hukum yaitu :

1. Metode Historis mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Perkembangan karakteristik budaya merupakan awal budaya masyarakat..
2. Budaya hukum yaitu, ide, gagasan, harapan masyarakat terhadap hukum.
3. Metode Deskriptif perilaku menggambarkan perilaku manusia dan budaya hukumnya termasuk melukiskan/ menggambarkan perilaku nyata jika mereka sedang berselisih/ bersengketa. (melihat system hukum mana yang digunakan (hukum adat atau hukum negara).

4. Metode study kasus mempelajari kasus-kasus mempelajari hukum dan penyelesaiannya yang berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan alternative terakhir.

Setiap masyarakat mempunyai persamaan terhadap suatu perkara, peristiwa, bahkan terhadap ideologi dan karena itu yang menjaminnya dalam suatu kesatuan (komunitas). Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan merupakan yang menyebabkan yang menyeluruh dari suatu kesatuan sikap dan perilaku.

Dengan mempelajari antropologi hukum ini kita dapat mengetahui bahwa kemanfaatan antropologi hukum tidak saja dapat dilihat dari segi kebutuhan teoritis tetapi dilihat juga pada dari peningkatan mutu berfikir ilmiah khususnya lingkungan perguruan tinggi terutama kepada ilmu-ilmu sosial dan terkhusus pula yang mempelajari tentang ilmu kemasyarakatan serta ilmu-ilmu budaya dan hukum terkhusus kepada praktisi-praktisi hukum yaitu dalam rangka pembangunan hukum pembentukan peraturan-peraturan hukum penegakan penerapan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat antropologi hukum ada 4 manfaat, antara lain:

1. Manfaat bagi Teoritis
2. Manfaat bagi Praktisi Hukum
3. Manfaat bagi Praktisi Politik
4. Manfaat bagi Pergaulan Masyarakat

1. Manfaat bagi Teoritis

Para teoritis yang dimaksud adalah ilmuan-ilmuan mahasiswa ilmu-ilmu sosial terutama pada sarjana-sarjana ilmu hukum antropologi.

Ilmu hukum yang lebih banyak mengabdikan diri kepada kepentingan memajukan ilmu

pengetahuan hukum yang termasuk dalam golongan ini adalah para tenaga tenagaten, staf pengetahuan staf peneliti ilmiah hukum, para dosen, asistennya, staf pengajar, dan mahasiswa yang lebih banyak berfikir dan berperilaku sebagai pengamat (toesshower) terhadap kehidupan umum, beberapa, manfaat teoritisnya yaitu :

1. Dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana dan modern.
2. Dapat mengetahui bagaimana bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki sebagai kaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut.
3. Dapat mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat/ pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan.
4. Dapat mengetahui suku bangsa/ masyarakat mana yang masih kuat/ fanatic mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka.

2. Manfaat Bagi Praktisi Hukum

Praktisi hukum yang dimaksud adalah cendekiawan hukum di atas panggung arena hukum dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam golongan ini seperti pembentuk hukum yaitu seperti DPR, pelaksana hukum seperti pejabat instansi pemerintah para penegak hukum yaitu: Polisi, jaksa, hakim, dan termasuk pengacara advokasi.

3. Manfaat bagi Praktisi Politik

Dimaksudkan praktisi politik adalah aktivis politik yaitu semua yang ada dalam fikiran dan perilakunya berperan dalam era politik baik yang duduk dalam pelaksanaan pemerintah penyelenggara negara maupun yang berada diluar pemerintah seperti diluar pemerintah seperti berada lembaga-lembaga partai, organisasi politik dan lain-lain.

4. Manfaat bagi Pergaulan Masyarakat

Dimaksudkan dengan pergaulan dalam masyarakat adalah bahwa bumi ini bertambah kecil bukan saja radio dan televisi yang sudah sampai kepedesaan tetapi juga telepon melalui jaringan hp yang sudah menjamur di pedesaan sehingga pembicaraan dalam jarak jauh sudah dapat dijangkau dalam waktu sesingkat mungkin ini adalah semua kemajuan ilmu teknologi.

Fungsi praktis bagi masyarakat adalah untuk memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat tentang arti penting, peran serta posisi hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Sedangkan manfaat umum dari mempelajari ilmu antropologi hukum adalah :

1. Mengetahui ilmu hukum yang sederhana di lingkungan masyarakat
2. Perubahan nilai-nilai hukum yang terjadi di masyarakat
3. Bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat di publik
4. Cara mempertahankan nilai kebudayaan

Dalam penerapannya ilmu ini dapat diterapkan selain dari hukum adalah biologi seperti:

1. Mempelajari dan mengetahui tentang fisiologi, susunan genetika, sejarah gizi dan evolusi dari seorang manusia yang berbeda

Dan aspek sosial seperti :

1. Mempelajari dan mengetahui beragam bahasa, budaya, politik, keluarga dan agama di berbagai daerah.

C. PENUTUP

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia . Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan sebelumnya. Pengertian Antropolgi dapat dilihat dari 2 sisi yaitu Antropologi sebagai ilmu pengetahuan artinya bahwa ilmu antropologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis atas dasar pemikiran yang logis. Dan pengertian antropologi yang kedua adalah cara-cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada dan mengakar didalam kehidupan masyarakat secara ilmiah dan teori dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Setelah mengkaji dalam mengenai manfaat, kita dapat mengemukakan hasilnya bahwa manfaat didalam antropologi hukum sangat luas dan cakupannya hampir meliputi seluruh komponen yang ada didalam masyarakat. Seperti yang kita lihat antropologi telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar bgai perkembangan ilmu hukum. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah dimanapun kita tidak akan pernah jauh dari hukum selama kita berada di negara hukum, yang selalu berkaitan erat dengan kehidupan sosial politik masyarakat indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

ica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v1i1.1831>.

Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021. Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>

Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.

Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .

Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.

Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialog

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..